



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG

Jl. Raya Sambeng Nomor 34 –Kode Pos 62284
Telp. (0322) 7710662 E-Mail : sambeng@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, Oktober 2024

Nomor : 470/ 640/413.311/2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan III Tahun 2024
Kecamatan Sambeng Kabupaten
Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III
Tahun 2024 Kecamatan Sambeng sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT SAMBENG



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

**LAPORAN TRIWULAN III PENGELOLAAN RISIKO
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

2024



JALAN RAYA SAMBENG NO. 34 LAMONGAN
sambeng@lamongankab.go.id/kec.sambeng@gmail.com

62284



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG

Jl. Raya Sambeng Nomor 34 -Kode Pos 62284
Telp. (0322) 7710662 E-Mail : sambeng@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	470/ 640 /413.311/2024
TANGGAL TERBIT	:	1 Oktober 2024

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Sambeng  Saiful, SE NIP. 19700603 200906 1 002
Diperiksa	:	Sekretaris Camat Kecamatan Sambeng  Hani Rahono, S.Sos NIP.19670606 198912 1 002
Disahkan Oleh	:	 Camat Sambeng Sukur, S.Pd., M.Pd NIP.19680621 199304 1 001

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat

bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Sambeng telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana terlampir:

Risiko Strategis OPD Kecamatan Sambeng:				
1 Melakukan pengajuan logistik KTP	Applikasi WA dengan grup se-Kecamatan Lamongan	Kasi Pelayanan Publik	Maret 2024	sedang dilaksanakan
2 konsultasi dengan PLN terkait sosialisasi pemadaman listrik	melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan pihak PLN Rayon Ploso	Kasubag Umum dan Kepegawaian	April 2024	sedang dilaksanakan
3 melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan	aplikasi WA grup dengan perangkat desa se-Kecamatan Sambeng	Kasi PPM	Januari 2024	Telah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Sambeng:				
1 Melakukan evaluasi data	Pengecekan secara langsung	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Okttober 2024	Telah dilaksanakan
2 Melaksanakan sesuai perencanaan	Pengecekan secara langsung	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	November 2024	Belum dilaksanakan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Sambeng telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, yang telah dilaksanakan adalah:

1. pengajuan logistik KTP
2. Pemadaman listrik bergilir
2. Melakukan monev terkait administrasi desa dan yang belum dilaksanakan adalah :

 1. Pengadaan barang dan jasa
 2. Melakukan evaluasi data

No "Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak	Keterangan	RTP	Pelaksanaan RTP	Pelaksanaan RTP	Keterangan
Risiko Strategis OPO Kecamatan Sambeng:									
1. Terlambatnya Pencetakan KTP Masyarakat	RSO.23.99.55.01	Periode Januari - Maret 2024	Ketersediaan logistik KTP belum terserpuh	Terlambatnya pencetakan administrasi kependudukan	sedang (dendaklanjut)	Melakukan pengajuan logistik KTP	Maret 2024	-	sedang dilaksanakan
Risiko Operasional OPO Kecamatan Sambeng:									
2. Pemadaman Listrik	RSO.23.99.55.02	Periode Januari - Desember 2024	Pemadaman bergilir atau gangguan listrik	terhambatnya pelayanan masyarakat	sedang (dendaklanjut)	Konsultasi dengan PLN terkait sosialisasi pemadaman listrik	April 2024	-	sedang dilaksanakan
3. Terhambatnya kenaikan status desa	RSO.23.99.55.03	Periode Januari 2024	Adanya perbedaan usul dengan SIPD RI	Pembangunan sarana dan prasarana kurang maksimal	telah (dendaklanjut)	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan	Januari 2024	-	Telah dilaksanakan
1. Keterlambatan dalam melaksanakan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Sambeng :	R00.23.99.55.01	Periode Oktober - Desember 2024	Kurangnya ketekunan pegawai	Pengarsipan tidak sesuai SOP	Sedang (dendaklanjut)	Melakukan evaluasi data	Oktober 2024	-	Telah dilaksanakan
2. Pembelian barang tidak sesuai spesifikasi dan kebutuhan	R00.23.99.55.02	Periode Oktober - Desember 2024	Ketidaksesuaian pembelian barang	Penggunaan sarana dan prasarana kurang maksimal	sedang (dendaklanjut)	Melakukan sesua perencanaan	November 2024	-	Belum dilaksanakan

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Sambeng :

1. Adanya perubahan anggaran yang menjadikan mundurnya beberapa pengadaan barang dan jasa
2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Sambeng harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi
3. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Sambeng dengan Kota Lamongan berjarak 1 jam, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Sambeng selaku penyedia layanan kependudukan.
4. Kualitas SDM perangkat desa yang belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III dapat simpulan bahwa masih perlu dilakukan ketelitian administrasi pengadaan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan evaluasi terkait pengadaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.